

## ANALISIS POTENSI RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI

Muhammad Muslimin\*<sup>1</sup>, Zainuddin Saenong<sup>2</sup>, Muhammad Nur Afiat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Korespondensi: [saenongzainuddin@gmail.com](mailto:saenongzainuddin@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

#### Received:

28 Maret 2022

#### Revised

29 Maret 2022

#### Accepted:

30 Maret 2022

#### Online available:

31 Maret 2022

#### Kata Kunci:

Potensi, Retribusi Daerah

#### Keywords:

Potential, Local  
Retribution

#### Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis retribusi daerah apa saja yang potensial di Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari antara lain: data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi dan target retribusi daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis Tipologi Klsen dengan menghitung kontribusi dan laju pertumbuhan retribusi daerah untuk menjawab klasifikasi potensi retribusi daerah di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis retribusi sampah/jasa kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi utama di Kota Kendari. Selanjutnya, retribusi yang termasuk dalam jenis potensial adalah retribusi atas penggunaan kekayaan daerah. Sedangkan retribusi berkembang meliputi biaya pelayanan kesehatan, biaya jasa pemakaman dan pemakaman, biaya jalan umum dan parkir, biaya pelayanan pasar, biaya pengujian kendaraan bermotor, biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya pencetakan peta, dan biaya pengendalian menara telekomunikasi. , biaya kalibrasi ulang, biaya tempat pelelangan, biaya parkir tempat khusus, biaya pelayanan pelabuhan, biaya rumah potong hewan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya lisensi penjualan alkohol dan biaya gangguan keramaian. Dan biaya yang termasuk dalam kategori terbelakang adalah biaya terminal, biaya izin trayek, biaya bus trans Lulo dan biaya izin usaha perikanan.

### Abstract

*This study aims to determine what types of regional retribution are potential in Kendari City. The data used in this study is secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of Kendari City including: target data and realization of Regional Original Revenue (PAD), realization and target of regional retribution. The analysis used is descriptive quantitative analysis with data analysis using Klsen Typology analysis by calculating the contribution and growth rate of regional retribution to answer the classification of potential regional retribution in Kendari City. The results showed that the type of retribution for waste/cleaning services and retribution for building permits were the main types of retribution in Kendari City. Furthermore, levies which are included in the potential type are levies on the use of regional wealth. Meanwhile, developing levies include health service fees, funeral and burial service fees, public road and parking fees, market service fees, motorized vehicle testing fees, fire extinguisher inspection fees, map printing fees, and telecommunication tower control fees. , recalibration fees, auction site fees, parking fees for special places, port service fees, abattoir fees, recreation and sports fees, alcohol sales license fees and crowd disturbance fees. And the fees included in the backward category are terminal fees, route permit fees, trans Lulo bus fees and fishery business license fees.*

## **PENDAHULUAN**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan Retribusi Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan. Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Rahmadani, 2018).

Demikian pula Kota Kendari dimana otonomi daerah diberlakukan sudah mulai aktif dalam menggali potensi-potensi di sektor ekonomi terkhususnya meningkatkan sumber sumber penerimaan pendapatan daerahnya sendiri guna dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut adalah data kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah:

**Tabel 1. Data Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PAD lain-lain yang sah (Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	PAD Lain-lain Yang SAH
2016	90.096.062.475	34.845.597.036	3.110.260.372	51.010.855.344
2017	100.967.114.548	24.979.224.867	3.543.874.217	88.850.415.333
2018	103.213.100.708	21.029.110.046	3.452.988.482	48.420.869.837
2019	119.628.043.058	23.951.836.918	5.376.250.571	66.374.844.241
2020	116.856.953.527	18.191.930.716	7.574.378.471	79.199.898.245

Sumber: Bapenda Kota Kendari, 2020

Berdasarkan tabel tersebut penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir dimana penerimaan terkecil yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 90.096.062.475 atau 50,31 persen kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sedangkan penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 119.628.043.058 atau 55,55 persen kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 adalah penerimaan terkecil yaitu sebesar Rp 18.191.930.716 atau 8,20 persen kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 34.845.597.036 atau 19,45 persen kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan terbesarnya yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 7.574.378.471 atau 3,41 persen kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan

PAD lain-lain yang sah penerimaan terbesarnya yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 88.850.415.333 atau 40,69 persen terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil uraian data tersebut, retribusi daerah belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah di bandingkan dengan pajak daerah dan PAD lain-lain yang sah. Ini menandakan bahwasanya pengelolaan retribusi daerah belum optimal dan belum memanfaatkan potensi yang dimilikinya di bandingkan pajak daerah dan PAD lain-lain yang sah. Hal ini sejalan dengan pendapat mardiasmo, dkk (2000:1.3-4) menyatakan bahwa disisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah, bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dihadapkan berbagai kendala, salah satunya yaitu beberapa jenis retribusi daerah yang tidak konsisten di pungut tiap tahunnya yaitu retribusi tera-tera ulang, buss trans lulo dan retribusi trayek. Dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala sehingga penerimaan retribusi masih belum optimal penerimaannya diantaranya retribusi terminal, dimana masih kurangnya terminal di Kota Kendari, dan retribusi pasar dimana kurangnya pasar dibandingkan dengan kota provinsi lain. Sehingga besarnya target yang ditetapkan pada setiap tahun tidak terealisasi sepenuhnya.

Dari uraian diatas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi retribusi daerah bagi pemerintah Kota Kendari belum diketahui, terutama jenis retribusi apa saja yang menjadi pendapatan potensial bagi pendapatan asli daerah. Apabila diketahui jenis retribusi yang potensial dan dapat ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensi yang di milikinya akan memberikan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ada beberapa Kecenderungan menunjukkan tingkat kontribusi yang tinggi dan potensinya dapat dikembangkan di Kota Kendari, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, kesehatan, persampahan, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis retribusi daerah apa saja yang potensial di Kota Kendari.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah retribusi daerah Kota Kendari, jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder, data tersebut yaitu data retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Kendari tahun 2016-2020. Data yang di gunakan dalam penelitian ini dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id/](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/), Dinas Pendapatan Kota Kendari dan Dinas lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tipologi klassen dimana analisis ini melihat tingkat pertumbuhan dan kontribusi suatu jenis sektor terhadap total sektor perekonomian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, tidak hanya ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai yaitu yang bersumber pada penerimaan daerah. Sumber dana yang bersumber dari penerimaan daerah ini digali tidak saja berasal dari pajak daerah, namun juga dari retribusi daerah dan desentralisasi merupakan 1sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan Pembangunan yang merata, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Berdasarkan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lima tahun terakhir yaitu 12,41 persen. Selanjutnya rata-rata kontribusi tertinggi jenis retribusi terhadap retribusi total yaitu jenis retribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 23,79 persen, izin mendirikan bangunan 23,38 persen, pelayanan persampahan/kebersihan 16,53 persen, dan pelayanan kesehatan 10,78 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi terendah jenis retribusi terhadap retribusi total yaitu jenis retribusi izin perikanan sebesar 0,01 persen, izin trayek 0,15 persen, dan tera-tera ulang 0,16 persen.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diketahui bahwasanya selama lima tahun terakhir setiap jenis retribusi daerah memiliki tingkat kontribusi dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi walaupun ada beberapa jenis retribusi yang rendah dalam penerimaan retribusi daerah Kota Kendari.

Retribusi Daerah selama ini ternyata hanya ditopang oleh beberapa jenis retribusi saja. Retribusi Daerah Kota Kendari sangat mengandalkan sektor retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan. Hanya kedua jenis retribusi ini yang termasuk dalam kategori retribusi unggulan atau prima. Meskipun berada pada kategori sektor retribusi potensial, namun jenis retribusi pemanfaatan kekayaan daerah memiliki tingkat kontribusi 23,79 persen dan telah dipungut secara sangat efektif, namun jenis retribusi tersebut cenderung masih kurang mampu mengoptimalakan potensi yang dimilikinya, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan yang mampu dicapainya, sehingga jenis retribusi tersebut belum mampu berada pada kategori jenis retribusi prima.

Ada beberapa sumber potensi Retribusi daerah yang belum digali dengan baik, salah satunya dari jenis retribusi pelayan kesehatan yang mampu memberikan kontribusi besar yaitu 10,78 persen akan tetapi laju pertumbuhannya yang begitu rendah yaitu sebesar - 11,52 persen. Ketersediaan sarana dan prasarana didaerah yang dapat menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat-pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai, masih relatif terbatas. Ini merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh daerah kabupaten/kota.

Tabel 2. Klasifikasi Potensi Retribusi Daerah Kota Kendari

Rata rata Kontribusi jenis Retribusi Rata rata Laju pertumbuhan	$\hat{Y} \text{ jenis} \geq \hat{Y} \text{ total retribusi}$	$\hat{Y} \text{ jenis} < \hat{Y} \text{ total retribusi}$

$r_{\text{jenis}} \geq r_{\text{retribusi}}$	<b>Unggulan/ Prima</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Persampahan/kebersihan</li> <li>• Izin Mendirikan Bangunan</li> </ul>	<b>Berkembang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</li> <li>• Pelayanan Parkir di tepi jalan umum</li> <li>• Pelayanan Pasar</li> <li>• Pengujian Kendaraan bermotor</li> <li>• Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>• Penggantian Biaya Cetak Peta</li> <li>• Pengendalian Menara Telekomunikasi</li> <li>• Tera-tera Ulang</li> <li>• Tempat Pelelangan</li> <li>• Tempat Khusus Parkir</li> <li>• Pelayanan Kepelabuhan</li> <li>• Rumah Pemotongan Hewan</li> <li>• Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> <li>• Izin tempat penjualan beralkohol</li> </ul>
$r_{\text{jenis}} < r_{\text{retribusi}}$	<b>Potensial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ul>	<b>Terbelakang</b> Terminal Izin Trayek buss Trans Lulo Izin Perikanan

Sumber: Data Olahan

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen dari masing-masing jenis retribusi daerah berdasarkan tingkat kontribusi dan laju pertumbuhannya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis retribusi unggulan/prima di Kota Kendari. Dengan demikian kedua jenis retribusi diharapkan mampu untuk diandalkan sebagai jenis retribusi daerah yang menjadi andalan pemerintah Kota Kendari dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya yang menjadi jenis retribusi potensial dan dapat digali lebih lanjut yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah hal ini berdasarkan pada tingkat kontribusi yang besar terhadap rata-rata kontribusi retribusi total terhadap PAD akan tetapi laju pertumbuhannya yang begitu rendah sebagai jenis retribusi yang potensial.

### DAFTAR PUSTAKA

Adi, A. S., & Sulistiyowati, F. (2013). ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 – 2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 55–65.

- Amalia, S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANJARMASIN. 1(1), 119–132.
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SERTA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2021. KOTA KENDARI DALAM ANGKA.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2019. PRODUK DOMESTIK BRUTO REGIONAL BRUTO (PDRB)
- Hasibuan, S. R. I. H. (2018). ANALISIS POTENSI RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG. 25–24.
- Horota, P., Ayu, I., & Riani, P. (2014). PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA. *Jurnal Kedua*, 2(1), 1–33.
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. ., & Tumangkeng, Y. . S. (2016). KONTRIBUSI DAN PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 559–567.
- Mahmudi. 2009. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.
- Nurlian, Rofingatun, S., & Wamafma, I. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEEROM). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 84–100.
- Safrita. (2011). PENGARUH RERIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYA PURA. *Jurnal Future*, 102–114.
- Samosir, M. S. (2019). ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 42–64.
- Samosir, M. S. (2019). ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 42–64.
- Pemerintah pemerintah 58 tahun 2005 KEUANGAN DAERAH. (<https://www.wikiapbn.org/keuangan-daerah/>). Di akses pada tanggal 22 mei 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. (<https://www.wikiapbn.org/keuangan-daerah/>). Di akses pada tanggal 22 mei 2021.

- Rahmadani, annisa. (2018). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA. Skripsi, FEB, UIN Sumatera Barat.
- Undang undang no 33 tahun 2004 tentang PENDAPATAN ASLI DAERAH. (<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pad-22664>). Di akses pada tanggal 22 mei 2021.
- Wangi, I. S. (2020). ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR KEBONPOLO , EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2018. *Jurnal Ekonomi-QU*. 10(2), 156–168.